

RENJA DISNAKERINTRANS 2024



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO
Jalan Gatot Subroto Km 5, Kertek Wonosobo , Phone: (0286) 321338 Email:
disnaker.wonosobo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu Tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

Namun demikian dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terimakasih.

Wonosobo, Agustus 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi,



Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197106231992031002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal.....	11
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2024	25
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2024	27
3.4 Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2024	28
Bab IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

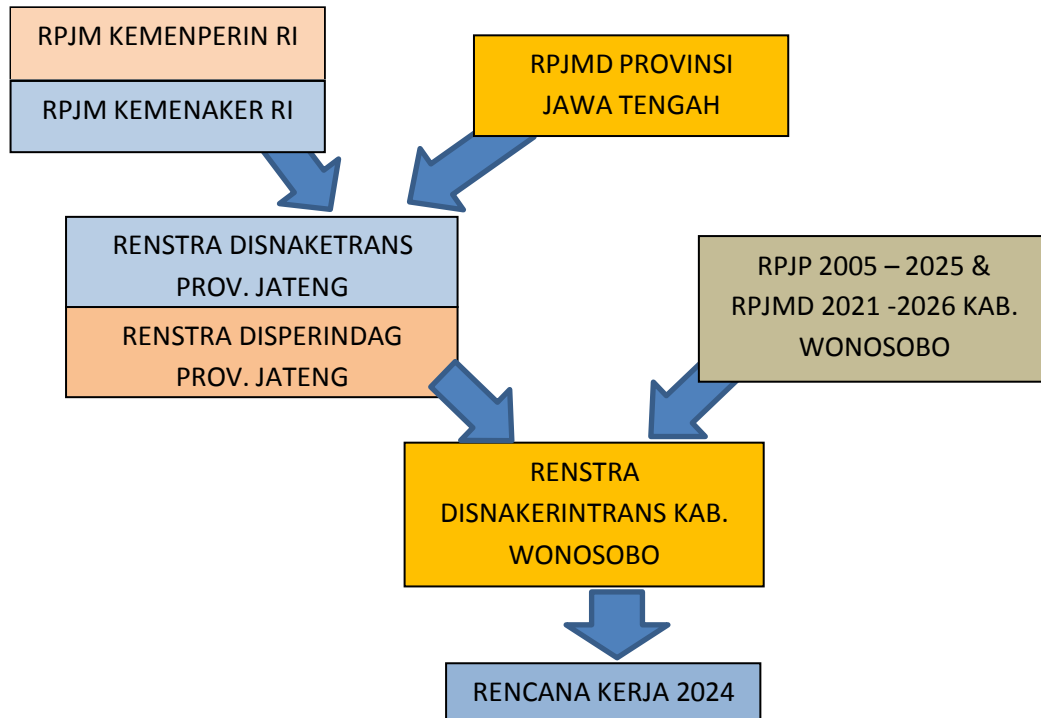
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 Ayat 1 diamanatkan bahwa setelah penyampaian Rancangan Awal RKPD, Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja.

Rencana Kerja (Renja) adalah penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, juga memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, RPJM Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Hubungan antara antara Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

a. Dasar Hukum RKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

b. Renja Kementerian Terknis

PERMENAKER NO. 10, 794, 5 HLM Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka reformasi kelembagaan dan mendorong perluasan kesempatan kerja akibat berbagai kemudahan berusaha dan berinvestasi, serta berbagai kemajuan dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan, maka peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga perlu diganti.
2. Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 17 Ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 40 Tahun 2006, Perpres No. 18 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021, Permenrenbangnas No. 6 Tahun 2020.
3. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rencana strategis Kementerian ketenagakerjaan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni

terhitung mulai tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Data dan informasi kinerja rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sisten Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024

c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

RKPD 2024 berfokus pada kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo masih berada di angka 68,43% atau di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Angka kemiskinan berada pada kisaran 17,67%. Namun berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu di angka 3,08.

Berdasarkan data tersebut di atas rencana kerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2024 berfokus pada peningkatan kualitas SDM guna mendukung peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia melalui program pelatihan pembinaan IKM dan pembentukan tenaga kerja mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2024 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran DPRD di Kabupaten Wonosobo.

b. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan untuk memastikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator pencapaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2021, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun lalu dan Capaian Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, meliputi Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi serta Program dan Kegiatan.
- Bab 4. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022

Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.988.026.257 dan terealisasi sejumlah Rp. 8.433.640.772 atau senilai 93,83%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
 SKPD Tahun 2022

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	8.327.961.257	7.822.306.427	93,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.278.509.257	4.799.723.408	90,92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.672.658.207	4.232.658.011	90,58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.209.350	149.419.000	99,47
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.661.700	293.769.711	88,57
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.980.000	123.876.686	99,91
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	16.741.500	16.741.500	100
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	16.741.500	16.741.500	100
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.369.000.000	2.346.005.559	99,03
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.344.000.000	2.321.005.559	99,02
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000	25.000.000	100
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	586.641.500	582.793.460	99,34
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	445.000.000	443.541.080	99,67
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	141.641.500	139.252.380	98,31
	Program Hubungan Industrial	77.069.000	77.042.500	99,97
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	77.069.000	77.042.500	99,97
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	618.245.000	569.574.500	92,13
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	597.215.000	549.644.500	92,03
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	597.215.000	549.644.500	92,03
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	21.030.000	19.930.000	94,77
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	21.030.000	19.930.000	94,77
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0	0	0
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	41.820.000	41.759.845	99,86
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	41.820.000	41.759.845	99,86
	pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	41.820.000	41.759.845	99,86

Sumber: Disnakerintrans 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

a. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2022. Lima pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM: besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dan mendapatkan pelatihan berbasis kerja berbasis kompetensi, target tahun 2022 adalah 83,04%.
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM: besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2022 adalah mencapai 25,45%.
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2022 adalah 100%
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM: besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2022 adalah mencapai 71,05%.

Perlu disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, diubah dengan Permenakertrans Nomor 2 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tentang Ketenagakerjaan

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Permendagri Nomor 73 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian ditetapkan 3 (tiga), yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan:

1. Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh, capaian kinerja 71,05% dengan rumusan perbandingan Jumlah pekerja / buruh

peserta program jamsostek aktif dengan Jumlah pekerja/ buruh dikali 100%.

2. Pencari Kerja yang Ditempatkan, capaian kinerja sebesar 71,05% dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%.

Urusan Ketrasmigrasian: Transmigrasi Swakarsa capaian kinerja 66,67% dengan rumusan jumlah Transmigran Swakarsa dibanding dengan jumlah Transmigran dikali 100.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Transmigrasi, yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait urusan ketenagakerjaan
 - a. Angka pengangguran masih cukup tinggi dengan perkembangan lapangan pekerjaan yang terbatas;
 - b. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
 - c. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD kebawah sebesar 278.098 orang atau 65,50% di tahun 2018;
 - d. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik;
 - e. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
 - f. Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Ketenagakerjaan masih kurang;
 - g. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
 - h. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid.
2. Permasalahan terkait urusan perindustrian
 - a. Hambatan peningkatan efisiensi produksi,
 - b. Pengusaha Industri Kecil Menengah lebih memprioritaskan pada

aspek produksi, sedangkan aspek pemasaran, keuangan, dan aspek manajemen masih sangat kurang.

- c. Industri Kecil Menengah masih lemah dalam inovasi desain produk.
- d. Kemitraan usaha dan jaringan pemasaran masih terbatas.
- e. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
- f. Terbatasnya dukungan infrastruktur pendukung sarana prasarana teknis dan kondisi mesin yang sudah tua
- g. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas.

3. Permasalahan terkait urusan transmigrasi

Jumlah animo transmigrasi tidak sebanding dengan target/ kuota yang diberikan dari Pusat (Kemenakertrans RI). Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Rendahnya kualitas calon transmigran dan kurangnya penguasaan informasi terhadap calon lokasi transmigrasi.

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa depan. Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan beberapa sumber, **pertama** berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, **kedua** berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo, **ketiga** bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo

(RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dan **keempat** didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketrasmigrasian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021 – 2026.

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan regional, dan daerah yang relevan dalam memberi arah pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian, dan ketrasmigrasian di Kabupaten Wonosobo. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis Urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketrasmigrasian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketrasmigrasian Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. Kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pelanggan;
4. Tata kelola pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja yang masih memerlukan perbaikan;
5. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
6. Lemahnya kemampuan IKM dalam aspek pemasaran, keuangan, dan manajemen;
7. Pelaku IKM masih lemah dalam menjaga kualitas produk, inovasi dan pengembangan desain kemasan dan produk;
8. Lemahnya jaringan kemitraan dengan industri besar dan perbankan;
9. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas; dan
10. Terbatasnya alokasi penempatan transmigrasi tidak sebanding dengan animo masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2024 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Sehingga tidak ada perubahan dalam Program-Kegiatan maupun besaran anggaran. Urusan wajib Ketenagakerjaan terdiri dari empat program dan delapan kegiatan, Urusan Pilihan Ketransmigrasian terdiri dari dua program dan dua kegiatan. Urusan pilihan Perindustrian terdiri dari dua program dan dua kegiatan, serta didukung dengan dua program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Wonosobo	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasika n	1 Dokumen	10.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Wonosobo	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasika n	1 Dokumen	10.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Wonosobo	Dokumen rencana tenaga kerja daerah	1 Dokumen	10.000.000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Wonosobo	Dokumen rencana tenaga kerja daerah	1 Dokumen	10.000.000	
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Wonosobo	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.000.000	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Wonosobo	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.000.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Wonosobo	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	15 perusaha an	480.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Wonosobo	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	15 perusaha an	480.000.000	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan		150.000.000	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan		150.000.000	
	Sub kegiatan Pelayanan antar Kerja	Wonosobo	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1200 Orang	80.000.000	Sub kegiatan Pelayanan antar Kerja	Wonosobo	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1200 Orang	80.000.000	
	Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Wonosobo	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	800 Orang	70.000.000	Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Wonosobo	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	800 Orang	70.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	1 Kasus	330.000.000	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	1 Kasus	330.000.000	
	Sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Wonosobo	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	80.000.000	Sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Wonosobo	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	80.000.000	
	Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Wonosobo	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	160 Orang	250.000.000	Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Wonosobo	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	160 Orang	250.000.000	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wonosobo	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	500 Orang		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wonosobo	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	500 Orang	2.992.132.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Wonosobo	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	12 Paket	1.830.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Wonosobo	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	12 Paket	1.830.000.000	
	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	Wonosobo	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada	150 Orang	1.050.000.000	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	Wonosobo	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada	150 Orang	1.050.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Tahun n			Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Tahun n			
	Sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Wonosobo	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	30.000.000	Sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Wonosobo	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	30.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	750.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	750.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Wonosobo	Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi		25.000.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Wonosobo	Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi		25.000.000	
	Sub kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Wonosobo	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	25.000.000	Sub kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Wonosobo	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	25.000.000	
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi			Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi			
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing	50 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing	50 Dokumen	50.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tenaga Kerja di Tingkat Daerah					Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			
	Program Hubungan Industrial	Wonosobo	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %	185.000.000	Program Hubungan Industrial	Wonosobo	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %	185.000.000	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	150 Perusahaan	15.000.000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	150 Perusahaan	15.000.000	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Wonosobo	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	15.000.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Wonosobo	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	15.000.000	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Wonosobo	Menurunnya jumlah perselisihan	0 Kasus	170.000.000	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Wonosobo	Menurunnya jumlah perselisihan	0 Kasus	170.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Wonosobo	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	20.000.000	Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Wonosobo	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	20.000.000	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	150.000.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	150.000.000	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Wonosobo	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	70%	100.000.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Wonosobo	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	70%	100.000.000	
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Terlaksananya jumlah persebaran penduduk di Kabupaten/kota	70%	100.000.000	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo	Terlaksananya jumlah persebaran penduduk di Kabupaten/kota	70%	100.000.000	
	Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Wonoosbo	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	100.000.000	Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Wonoosbo	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	100.000.000	
	Program	Wonosobo	Persentase aset		5.857.690.860	Program	Wonosobo	Persentase aset		5.857.690.860	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		perangkat daerah dalam kondisi baik			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		perangkat daerah dalam kondisi baik			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.989.190.860	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.989.190.860	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wonosobo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.989.190.860	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wonosobo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		4.989.190.860	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		170.500.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		170.500.000,00	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wonosobo	Jumlah paket penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wonosobo	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wonosobo	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	20.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wonosobo	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	20.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wonosobo	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	11.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wonosobo	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	11.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Wonosobo	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	2.500.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Wonosobo	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	2.500.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonosobo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	125.000.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonosobo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	125.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Wonosobo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Wonosobo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosobo	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	20.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosobo	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	20.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		431.000.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		431.000.000,00	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wonosobo	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	94.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wonosobo	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		94.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wonosobo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wonosobo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	
	Sub kegiatan	Wonosobo	Jumlah Laporan	12	328.000.000	Sub kegiatan	Wonosobo	Jumlah Laporan	12	328.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		212.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		212.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Wonosobo	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	10 Unit	70.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Wonosobo	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	10 Unit	70.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Wonosobo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Wonosobo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosobo	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	10.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosobo	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	10.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wonosobo	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wonosobo	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Wonosobo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	25.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Wonosobo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	25.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		5.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Wonosobo	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosobo	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Wonosobo	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	70%	4.297.300.815	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Wonosobo	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	70%	4.297.300.815	
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Wonosobo	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	70%	4.297.300.815	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Wonosobo	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	70%	4.297.300.815	
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	1 Dokumen	1.397.300.815	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Wonosobo	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	1 Dokumen	1.397.300.815	
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	3 Dokumen	2.800.000.000	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	3 Dokumen	2.800.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perwilayahan Industri		Perwilayahan Industri			Perwilayahan Industri		Perwilayahan Industri			
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	50.000.000	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	3 Dokumen	50.000.000	
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	50.000.000	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	50.000.000	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Wonosobo	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database industri kecil menengah (IKM) Kabupaten	80%	100.000.000	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Wonosobo	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database industri kecil menengah (IKM) Kabupaten	80%	100.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Wonosobo	Cakupan penyediaan informasi industri	5 Dokumen	100.000.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Wonosobo	Cakupan penyediaan informasi industri	10 Dokumen	100.000.000	
	Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	1 Dokumen	50.000.000	Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	1 Dokumen	50.000.000	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	Sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Wonosobo	"Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas"	1 Dokumen	50.000.000	Sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Wonosobo	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas"	1 Dokumen	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi menyelenggarakan forum terbuka OPD yang dihadiri Kepala BAPPEDA, Pemdes Panerusan, Pemdes Mergolangu, Pemdes Kaliguwo, Pemdes Gumiwang dan Ketua TP PKK Kaliwiro terdapat sembilan usulan yang akan masuk kedalam Renja Disnakerintrans TA 2024 diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas makanan dan minuman madu klanceng
- b. Fasilitasi Sertifikat Halal rumah ayam potong
- c. Fasilitasi Sertifikat Halal produk home industri
- d. Peningkatan lebel makanan dan minuman madu klanceng
- e. Peningkatan Pelatihan Las di dukuh kandangan
- f. Peningkatan Tata Boga desa gumiwang
- g. Peningkatan pelatihan industri rumah tangga
- h. Peningkatan kapasitas pabrik jamu

Pada bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Sampai dengan tahun ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat umum yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui musrenbang mulai dari

musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan: **pertama** berdasarkan pada rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, **kedua** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025, **ketiga** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026, **keempat** Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024

Selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi, diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi kedua yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi” serta fokus pada program unggulan “Wonosobo Sehat” dan “Wonosobo Pinter”.

Misi kedua, yaitu meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja dan meningkatnya kuantitas industri pengolahan dan kualitas produk, melalui strategi menciptakan peluang kerja dan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan produksi dan produktivitas IKM. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mendukung program unggulan Wonosobo sehat melalui peningkatan standarisasi dan sertifikat halal untuk industri pengolahan dalam rangka mewujudkan

kampung aman dan halal pangan. Sedangkan untuk Wonosobo pintar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi berkolaborasi dengan BLK komunitas untuk mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurship) pesantren serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pembentukan 100 wirausaha baru terutama rumah tangga miskin.

3.3 Program dan Kegiatan 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo untuk Tahun 2021 – 2026 yaitu “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera” maka uraian program beserta kegiatan yang dirancang Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024**

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	- penguatan program link and match dengan dunia industri/dunia usaha melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi tenaga Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;	Program Perencanaan Tenaga Kerja			10.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	10.000.000	0	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	1	dokumen
2			Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		10.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	10.000.000	0	Dokumen rencana tenaga kerja daerah	1	dokumen
3				Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	10.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	10.000.000	0	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5	perusahaan
4	penguatan program link and match dengan dunia industri/dunia usaha melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi tenaga	Program Penempatan Tenaga Kerja			480.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	480.000.000	1.015.000.000	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	15	perusahaan

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Target	Satuan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kerja sesuai kebutuhan pasar kerja												
5			Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	150.000.000	410.000.000	Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan	100	orang
6				Sub kegiatan Pelayanan antar Kerja	80.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	80.000.000	205.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1200	orang
7	-pembentukan wirausaha baru mandiri melalui pelatihan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi pemuda, pesantren serta penyandang disabilitas; -perluasan penempatan kerja melalui job fair dan job canvassing.			Sub kegiatan Penyuluh dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	70.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	70.000.000	205.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250	orang
8			Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna		330.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	330.000.000	605.000.000	Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan	1	kasus
			Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								Purna Penempatan)		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Target	Satuan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9				Sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	80.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	80.000.000	205.000.000	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50	orang
10				Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	250.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	250.000.000	400.000.000	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	120	orang
11	Peningkatan SDM pelaku industrimelalui penguasaan teknologi, pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi penempatan kerja);	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.905.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	1.905.000.000	1.240.000.000	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	500	orang
12	peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja;		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		1.830.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	1.830.000.000	920.000.000	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	12	paket
13				Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.050.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	1.050.000.000	350.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150	orang

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14				Sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	30.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	30.000.000	70.000.000	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20	lembaga
15				Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	750.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	750.000.000	500.000.000	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50	unit
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		25.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari-Desember 2024	25.000.000	65.000.000			
			Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Target	Satuan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16	pemberdayaan kewirausahaan pesantren melalui BLK komunitas.			Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	25.000.000	65.000.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30	lembaga
17			Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	50.000.000	255.000.000	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	100	%
18				Sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	50.000.000	255.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	50	dokumen
19	peningkatan sistem pengawasan perlindungan tenaga kerja; peningkatan sistem pengawasan perlindungan tenaga kerja;	Program Hubungan Industrial			185.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	185.000.000	192.000.000	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100	%

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	15.000.000	25.000.000	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	200	perusahaan
21				Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	15.000.000	25.000.000	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3	laporan

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		170.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	170.000.000	167.000.000	Menurunnya jumlah perselisihan	0	kasu s
23			Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah		20.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	20.000.000	42.000.000	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1	perk ara
24			Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	150.000.000	125.000.000	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	lemb aga

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
28		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			100.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari-Desember 2024	100.000.000	175.000.000	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	70	%
29			Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari-Desember 2024	100.000.000	175.000.000	Terlaksananya jumlah persebaran penduduk di Kabupaten/kota	70	%
33				Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	100.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari-Desember 2024	100.000.000	175.000.000	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2	loka si
34		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.857.690.860	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	5.857.690.860	5.299.621.265	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.989.190.860	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	4.989.190.860	4.300.571.265	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
36				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.300.071.265,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	4.300.071.265,00	5.010.552.433	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		
37			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		170.500.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	170.500.000	198.050.000,	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
38				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	12.000.000	20.000.000	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
39				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	20.000.000	40.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
40				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	11.000.000,00	15.500.000	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
41				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	2.500.000,00	2.550.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	dokumen
42				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	125.000.000,00	120.000.000	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	laporan
43			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.000.000,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	50.000.000,00	35.000.000	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
44				Sub kegiatan Pengadaan Mebel	30.000.000,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	30.000.000,00	15.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	unit
45				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	20.000.000,00	20.000.000	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	unit

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
46			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		431.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	431.000.000	618.000.000	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
47				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	94.000.000	113.000.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
48				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	9.000.000	15.000.000	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	laporan
49				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	328.000.000	490.000.000	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan
50			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		212.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	212.000.000	146.000.000	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
51				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	70.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	70.000.000	80.000.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	10	unit
52				Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	7.000.000,00	15.000.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	unit
53				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	10.000.000	10.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	unit
54				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	100.000.000	25.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	25.000.000	15.000.000	Terlaksananya kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1	unit

											Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
55			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		5.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	5.000.000	2.000.000	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Daerah		
56				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	5.000.000	2.000.000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan
57		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			4.297.300.815	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	4.297.300.815	855.000.000	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	70	%
58			Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		4.297.300.815	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	4.297.300.815	855.000.000	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	70	%
59				Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.397.300.815	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	1.397.300.815	50.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	1	dokumen
60	peningkatan nilai tambah produk melalui diversifikasi produk dan hilirisasi industri pengolahan pangan			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	2.800.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	2.800.000.000	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	2	pelat ihan

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	berbahan baku lokal;			Penyebaran dan Perwilayahan Industri							dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
61	optimalisasi jejaring industri pengolahan melalui pembentukan klaster industri.			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	50.000.000	205.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	3	dokumen
62				Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	50.000.000	500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10	dokumen

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
63	Peningkatan kualitas dan daya saing produk industri pengolahan pangan berbahan baku lokal melalui standarisasi/sertifikasi produk dan penerapan teknologi/inovasi produk;	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			100.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	100.000.000	200.000.000	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database industri kecil menengah (IKM) Kabupaten	75	%
64	- Fasilitasi sertifikasi halal untuk mendukung pengembangan Kampung Aman dan Halal Pangan		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	100.000.000	200.000.000	Cakupan penyediaan informasi industri	1	dokumen
65				Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	50.000.000	0	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
66				Sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2024	50.000.000	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	dokumen

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Rencana Kerja tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.

Wonosobo, Agustus 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi,

Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197106231992031002